

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN II			ANGGARAN			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)=8/7	(10)	(11)	(12)=10/11	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	98,80%	0%	0%	6.919.649.179	884.249.710	12,78		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	
	Kawasan Permukiman	Presentase pengurangan Kawasan Kumuh	89,36	89,36%	30%	34%	135.621.900	294.000	0,22	1. Pengunduran jadwal penandatanganan kontrak dengan Konsultan Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) 2. Penandatanganan kontrak baru terlaksana pada minggu ke 2 Juni 2024		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (rekanan)
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen				98.709.750	294.000	0,30	1. Pengunduran jadwal penandatanganan kontrak dengan Konsultan Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) 2. Penandatanganan kontrak baru terlaksana pada minggu ke 2 Juni 2024		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (rekanan)
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen				98.709.750	294.000	0,30	1. Pengunduran jadwal penandatanganan kontrak dengan Konsultan Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) 2. Penandatanganan kontrak baru terlaksana pada minggu ke 2 Juni 2024		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (rekanan)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan				36.912.150	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan				36.912.150	-	-		Anggaran dihilangkan di Perubahan	

	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24	86,24%	0%	0%	6.221.473.543	883.955.710	14,21		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	
	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan		6.221.473.543	883.955.710	14,21	1. Keterlambatan jumlah personel 2. Keterlambatan proses pengadaan di ULP, Karena jumlah kegiatan yang diproses di ULP sangat banyak		Pelaksanaan kegiatan terkendala disebabkan banyaknya pelaksana kegiatan yang diproses oleh ULP
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan		6.221.473.543	883.955.710	14,21	1. Keterlambatan jumlah personel 2. Keterlambatan proses pengadaan di ULP, Karena jumlah kegiatan yang diproses di ULP sangat banyak		Pelaksanaan kegiatan terkendala disebabkan banyaknya pelaksana kegiatan yang diproses oleh ULP
	Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100,00%	0%	0%	562.553.736	-	-		Untuk Indikator ini, Kegiatannya bersifat Situasional, yang Sifat pekerjaannya sudah direncanakan , jika seandainya ada masyarakat yang patut dibantu keuangan baru terealisasi, hal ini dituju kan untuk pemenuhan SPM yg diamanatkan dari Kenetrrian RI meskipun demikian laporan kepusat tetap dibuatkan per tri wulan	Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit				104.960.000	-		Tidak ada program pemerintah daerah yang mengakibatkan relokasi bangunan		Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit				44.960.050	-		Bencana lahar dingin pada tanggal 11 Mei 2024 telah dikeluarkan SK Bencana No 114 tertanggal 26 Mei 2024, rencana nya BPBD akan mengajukan proposal bantuan ke pusat untuk merehab 17 rumah korban bencana sesuai SK Walikota Nomor 125 tertanggal 12 Juni 2024		Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)

	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit				59.999.950			Tidak ada program pemerintah daerah yang mengakibatkan relokasi bangunan	Untuk Indikator ini, Kegiatannya bersifat Situasional, yang Sifat pekerjaannya sudah direncanakan, jika seandainya ada masyarakat yang patut dibantu keuangan baru terealisasi, hal ini ditujukan untuk pemenuhan SPM yg diamanatkan dari Kementerian RI meskipun demikian laporan kepusat tetap dibuatkan per tri wulan	Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen				457.593.736	269.538.046	58,90	1. Kegiatan Rusun terlaksana sesuai jadwal 2. Kurangnya kesadaran penghuni untuk melaksanakan kewajiban sebagai penghuni seperti pembayaran rekening air dan listrik.		Pelaksanaan kegiatannya Rutin
	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen				457.593.736	269.538.046	58,90	1. Kegiatan Rusun terlaksana sesuai jadwal 2. Kurangnya kesadaran penghuni untuk melaksanakan kewajiban sebagai penghuni seperti pembayaran rekening air dan listrik.		Pelaksanaan kegiatannya Rutin
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	85%	85,00%		0%	15.360.275.594	4.583.698.964	29,84		Indikator kinerja sampai saat ini 0%, karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	
	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	50,00%			267.464.600	73.903.450	27,63	1. Proses pengumpulan data memakan waktu yang lama 2. Penyesuaian dengan jadwal tenaga ahli dan jadwal DLH Provinsi		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Tenaga Ahli)
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen				267.464.600	73.903.450	27,63	1. Proses pengumpulan data memakan waktu yang lama 2. Penyesuaian dengan jadwal tenaga ahli dan jadwal DLH Provinsi		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Tenaga Ahli)
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen				122.623.600	73.903.450	60,27	1. Proses pengumpulan data memakan waktu yang lama 2. Penyesuaian dengan jadwal tenaga ahli dan jadwal DLH Provinsi		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Tenaga Ahli)
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen				144.841.000	-	-		Anggaran dihilangkan di perubahan	
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	35,00%	0%	0%	443.897.123	143.477.432	32,32		Indikator kinerja sampai saat ini 0%, karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis				425.770.873	142.135.432	33,38	1. Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup 2. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca 3. sebagian Peralatan alat uji rusak (anggaran tidak mencukupi) 4. Bimtek belum terlaksana karena Penyesuaian Jadwal Nara Sumber		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Nara sumber dan kurangnya Anggaran) dan perlunya koordinasi dan pihak terkait
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen				16.010.100	4.944.500	30,88	Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup		Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen				28.797.000	2.817.045	9,78	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca		Perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis				380.963.773	134.373.887	35,27	1. Kegiatan pemeliharaan alat laboratorium belum bisa dilakukan karena setelah alat diperiksa oleh perusahaan penyedia ternyata suku cadang untuk penggantian alat yang rusak itu diatas anggaran di DPA dan akan dikerjakan setelah Perubahan Anggaran 2. Belanja Kalibrasi alat belum bisa dilakukan karena alat harus dilakukan pemeliharaan dulu baru kalibrasi bisa dilaksanakan sementara anggaran untuk pemeliharaan masih kurang anggaran awal dan akan dilakukan kembali setelah perubahan anggaran. 3. Belanja IHT (Pelatihan) belum bisa dilaksanakan karena rencana awal untuk mendatangkan narasumber dari luar daerah tidak bisa dilaksanakan karena penyesuaian jadwal narasumber dan akan dilakukan kembali pada bulan November 2024 setelah perubahan anggaran dengan narasumber dari Provinsi.		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Nara sumber dan kurangnya Anggaran)

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis				18.126.250	1.342.000	7,40	Perlunya disampaikan informasi kualitas lingkungan kepada Masyarakat		Kepada Masyarakat selalu diberikan Informasi kualitas lingkungan berupa Leaflet, Lewat Media dan lainnya
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	4 kali	1 kali		18.126.250	1.342.000	7,40	Perlunya disampaikan informasi kualitas lingkungan kepada Masyarakat		Kepada Masyarakat selalu diberikan Informasi kualitas lingkungan berupa Leaflet, Lewat Media dan lainnya
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	4,23%	4,23%	4,23%	100%	2.076.546.250	776.983.744	37,42		Indikator tercapai karena pelaksanaan kegiatannya selalu dilaksanakan setiap hari	Tetap selalu melakukan pemeliharaan Taman
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan		2.076.546.250	776.983.744	37,42			Tetap selalu melakukan pemeliharaan Taman
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	53 Ha	53 Ha		2.048.429.850	776.983.744	37,93	Mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik		Tetap selalu melakukan pemeliharaan Taman
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang				28.116.400	-	-	Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati melalui Pelatihan direncanakan pada bulan Juli 2024		Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2024
	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%	32,00%	0%	0%	20.963.900	1.470.800	7,02		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	

	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 kali		0%		6 433.400	1.122.000	17,44	Realisasi keuangan masih rendah karena biaya makan dan minum aktivitas lapangan belum teralisasi disebabkan karena penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari lingkungan hidup sedunia rencananya dilaksanakan pad bulan Mei s/d Juli 2024, akan tetapi dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan		Pelaksanaan kegiatan tertunda disebabkan dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi, sehingga mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan		0%		6 433.400	1.122.000	17,44	Realisasi keuangan masih rendah karena biaya makan dan minum aktivitas lapangan belum teralisasi disebabkan karena penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari lingkungan hidup sedunia rencananya dilaksanakan pad bulan Mei s/d Juli 2024, akan tetapi dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan		Pelaksanaan kegiatan tertunda disebabkan dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi, sehingga mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina / diverifikasi lapangan	24	24	0%	0%	14 530.500	348.800	2,40	Realisasi keuangan masih rendah karena biaya makan dan minum aktivitas lapangan belum teralisasi disebabkan karena penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari lingkungan hidup sedunia rencananya dilaksanakan pad bulan Mei s/d Juli 2024, akan tetapi dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan		Pelaksanaan kegiatan tertunda disebabkan dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi, sehingga mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen		0%		14 530.500	348.800	2,40	Realisasi keuangan masih rendah karena biaya makan dan minum aktivitas lapangan belum teralisasi disebabkan karena penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari lingkungan hidup sedunia rencananya dilaksanakan pad bulan Mei s/d Juli 2024, akan tetapi dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan		Pelaksanaan kegiatan tertunda disebabkan dengan adanya terjadi bencana lahar dingin gunung merapi, sehingga mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan kegiatan

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55%	55%	0%	0%	23.585.300	2.497.950	10,59		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%	50%		23.585.300	2.497.950	10,59	Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Target , tetap selalu melaksanakan pemantauan ke lapangan
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 badan usaha	30 badan usaha	10 badan usaha		23.585.300	2.497.950	10,59	Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Target , tetap selalu melaksanakan pemantauan ke lapangan
	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH (pendataan, pendampingan)	50%	50,00%	0%	0%	19.999.850	-	-		Angaran dihilangkan di perubahan	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 dokumen				19.999.850	-	-		Angaran dihilangkan di perubahan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 dokumen				19.999.850	-	-		Angaran dihilangkan di perubahan	
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100%	50%	50%	30.000.000			Adanya keterlambatan penyerahan laporan dari kader lingkungan		Selalu mengingatkan kepada kader lingkungan terkait laporan yang diminta dan lainnya

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan		30.000.000		-	1. Pembuatan bahan-bahan body bag 3R membutuhkan proses dan waktu yang lama 2. Pertemuan sudah mulai dilakukan, pencairan dana direncanakan pada pertengahan bulan Juli		Pelaksanaan kegiatan dalam proses
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	1 kali pendampingan			30.000.000		-	1. Pembuatan bahan-bahan body bag 3R membutuhkan proses dan waktu yang lama 2. Pertemuan sudah mulai dilakukan, pencairan dana direncanakan pada pertengahan bulan Juli		Pelaksanaan kegiatan dalam proses
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	16 kelompok masyarakat	3 kelompok masyarakat		10.000.000	1.000.000	10,00	Kegiatan dalam proses desain, bufilet dan stiker sesuai dengan kelompok masyarakat penerima (sekolah dan masyarakat)		Pelaksanaan kegiatan dalam proses
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat		183.999.950	34.441.700	18,72	Keterlambatan kader menyerahkan laporan		Selalu mengingatkan kepada kader lingkungan terkait laporan yang diminta dan lainnya
	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis			93.362.600		-	Kegiatan sudah mulai berjalan, realisasi keuangan diperkirakan pada akhir tahun karena menunggu penghargaan dari DLH Provinsi dan KLHK		Selalu berkordinasi dengan TIM Penilai Adipura Kemen LHK
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok				93.362.600		-	Kegiatan sudah mulai berjalan, realisasi keuangan diperkirakan pada akhir tahun karena menunggu penghargaan dari DLH Provinsi dan KLHK		Selalu berkordinasi dengan TIM Penilai Adipura Kemen LHK
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok				93.362.600		-	Kegiatan sudah mulai berjalan, realisasi keuangan diperkirakan pada akhir tahun karena menunggu penghargaan dari DLH Provinsi dan KLHK		Selalu berkordinasi dengan TIM Penilai Adipura Kemen LHK
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	100%	50%	50%	19.723.300		-	Insidentil (bila ada pengaduan)		Meskipun tidak adanya pengaduan dari Masyarakat, akan tetapi kita tetap selalu melakukan pemantauan kelapangan
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 dokumen				19.723.300		-	Insidentil (bila ada pengaduan)	pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup	Meskipun tidak adanya pengaduan dari Masyarakat, akan tetapi kita tetap selalu melakukan pemantauan kelapangan

	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen				11.103.350	-	-	Insidentil (bila ada pengaduan)	pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup	Meskipun tidak adanya pengaduan dari Masyarakat, akan tetapi kita tetap selalu melakukan pemantauan kelapangan
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen				8.619.950	-	-		Angaran dihilangkan di perubahan	
	Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98%	98%	99,3%	101%	12.364.732.671	3.585.365.588	29,00			Target Indikator meningkat karena salah satunya adalah dengan adanya pemilahan sampah di TPA serta Pelayanan pengelolaan sampah di lapangan
	Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98%	98%	99,3%	101%	12.364.732.671	3.585.365.588	29,00			Target Indikator meningkat karena salah satunya adalah dengan adanya pemilahan sampah di TPA serta Pelayanan pengelolaan sampah di lapangan
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah				40.000.000	-	-	Belum Maksimalnya peran Kelompok Masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Sampah, kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Juli		Pelaksanaan kegiatan dalam proses
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan	1 dokumen				9.150.000	-	-	Belum terdokumentasikan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana		Pelaksanaan kegiatan dalam proses

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)		6.508.403.081	866.263.301	13,31	Terdapat anggaran belanja modal instalasi Pengolahan sampah yang tidak akan direalisasikan.		Rencananya anggaran belanja modal instalasi Pengolahan sampah tidak jadi direalisasikan karena lokasi untuk menem patkan alat tersebut belum men dapatkan Izin dari KAN Gunung
	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	15.000 - 20.000 ton/tahun	7523,52 ton		5.807.179.590	2.719.102.287	46,82	Perlunya operasional penanganan sampah		Operasional penan ganan sampah tetap selalu dilaksanakan setiap hari
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80%	98,80%	15,00%	15,18%	2.561.117.300	23.346.829	0,91	Pelaksanaan Kegiatan terkendala pada Pola anggaran yang awalnya bantuan berupa barang dan Jasa diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan		
	Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase permukiman layak huni	96,62%	96,62%	15%	15,52%	2.561.117.300	23.346.829	0,91	Realisasi Keuangan masih rendah karena sebelumnya ada Peru bahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan		Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena ada Peru bahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk penoegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 unit				2.561.117.300	23.346.829	0,91	Realisasi Keuangan masih rendah karena sebelumnya ada Peru bahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan		Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena ada Peru bahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan

	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 Unit				2.561.117.300	23.346.829	0,91	Realisasi Keuangan masih rendah karena sebelumnya ada Perubahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan		Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena ada Perubahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
JUMLAH							24.841.042.073	5.491.295.503	22,11			

Padang Panjang, Juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128

Telp/Fax (0752) 485541

Email: perkimplhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

NOTULEN

R a p a t : Rapat Monitor Evaluasi (Monev) Pengukuran Kinerja 2024
Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024
Waktu /Rapat : 09.00 – 12.00 WIB
Peserta Rapat : 1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan Kepala Bidang
3. Sub Koordinator dan Kasubag Umum & Kepegawaian
4. Kepala Tata Usaha Labor beserta Staf

PEMBAHASAN

Kegiatan rapat ini dilaksanakan untuk mengevaluasi Capaian Kinerja dan Program, dengan rincian sebagai berikut :

I. Evaluasi Program

Dari Pembahasan tersebut, bila dilihat dari segi Program Kegiatan, secara keseluruhan belum banyak realisasi yang sesuai dengan target rencanakan, diantaranya ada beberapa program yang belum tercapai sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 86% realisasi 85,50% (realisasi fisiknya yaitu berupa laporan ke pusat per triwulan, namun realisasi keuangannya belum terealisasi), realisasi keuangannya pada saat ini sebesar Rp. 0,- dengan target keuangan sebesar Rp. 376.422.000,- (66,91%). Pada program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan 2 Sub kegiatan yaitu Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota.
- Indikator sasaran program ini adalah Presentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani target Triwulan II tahun 2024 adalah 100% untuk triwulan II realisasinya 0%, Realisasi belum sesuai dengan target, karena pada program ini pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional , sifat pekerjaannya sudah direncanakan, untuk realisasi keuangan Jika seandainya ada masyarakat yang patut dibantu, hal ini ditujukan untuk Pemenuhan SPM yang diamanatkan dari Kementrian RI meskipun demikian laporan ke Pusat tetap dibuatkan per triwulan.
- Capaian realisasi Fisik sudah sesuai dengan target, sementara capaian keuangan 0 % dikarenakan pada program ini pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional , sifat pekerjaannya sudah direncanakan, untuk realisasi keuangan Jika seandainya ada masyarakat yang patut dibantu, hal ini ditujukan untuk Pemenuhan SPM yang diamanatkan dari Kementrian RI
- Capaian realisasi Fisik sudah sesuai dengan target, sementara capaian keuangan 0 % dikarenakan pada program ini pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional , sifat pekerjaannya sudah direncanakan, untuk realisasi keuangan Jika seandainya ada masyarakat yang patut dibantu, hal ini ditujukan untuk Pemenuhan SPM yang diamanatkan dari Kementrian RI

b. Program Kawasan Permukiman

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 98% realisasi 15%, sementara target keuangan sebesar Rp. 134.092.550,- (98,87%) dan realisasi Rp. 294.000,- (0,30%), pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HA. Pada Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu 1) Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Penyelenggaraan, Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh.
- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh dengan target tahun 2024 adalah 89,36% untuk triwulan II realisasinya 30%, hal ini disebabkan karena 1. Pengunduran jadwal penandatanganan kontrak dengan Konsultan Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) 2. Penandatanganan kontrak baru terlaksana pada minggu ke 2 Juni 2024
- Capaian realisasi keuangan masih rendah, pada Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP terkendala karena adanya proses permohonan pendampingan ke Balai Permukiman yang sedang berlangsung, sementara pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Penyelenggaraan, Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh realisasi keuangan rendah karena anggaran kegiatan ini adalah sebagai dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan KOTAKU di daerah, akan tetapi pada saat ini pelaksanaan kegiatannya belum dimulai oleh Tim KOTAKU Pusat

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 97% realisasi 15%, sementara target keuangan sebesar Rp. 2.488.185.900,- (97,15%) dan realisasi Rp. 23.346.829,- (0,91%), pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Permukiman Layak Huni dengan target tahun 2024 adalah 96,62% sementara realisasinya 15% disebabkan karena sebelumnya adanya Perubahan Pola Anggaran yang awalnya bantuan bahan dan upah sekarang menjadi bantuan sosial sehingga perlu disusun kembali aturan Hukum sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
- Capaian realisasi Fisik belum sesuai dengan target disebabkan karena sebelumnya adanya Perubahan Pola Anggaran yang awalnya bantuan bahan dan upah sekarang menjadi bantuan sosial sehingga perlu disusun kembali aturan Hukum sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- Rencana capaian Fisik (98%) realisasi 25%, sementara target keuangan sebesar Rp. 6.066.904.200,- (97,52%) dan realisasi Rp. 883.955.710,- (14,21%), pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Urusan Penyelenggaraan PSU Perubahan dan terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (PSU)
- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam kondisi baik dengan target tahun 2024 adalah 86,24% dan realisasi 0% karena perhitungan indikatornya hanya bisa didapatkan dari perhitungan realisasi di akhir Tahun 2024.
- Capaian realisasi kegiatan yang dilaksanakan masih rendah disebabkan karena sebelumnya pelaksanaan kegiatannya masih dalam proses perencanaan dan rencananya terealisasi pada bulan dan sudah terealisasi pada bulan Juni 2024

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 47,50% realisasi 47,50%, (sesuai dengan rencana) sementara target keuangan sebesar Rp. 116.010.000,- (43,37%) dan realisasi Rp. 73.901.540,- (27,63%), pada program ini terdapat 1 kegiatan , yaitu : 1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu : Pembuatan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dan Pembuatan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang
- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan dengan target tahun 2024 adalah 100% untuk triwulan II realisasinya 50% (sesuai dengan rencana)
- Capaian realisasi Fisik belum sesuai dengan rencana dan keuangannya masih rendah karena tertundanya pelaksanaan kegiatan (penyesuaian jadwal Tenaga Ahli) sehingga tidak bisa mencairkan biaya Makan, Minum dan biaya yang lainnya.

f. Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 63,67% realisasi 59,17%, sementara target keuangan sebesar Rp. 302.063.928,- (68,05%) dan realisasi Rp. 143.477.432,- (36,14%), pada program ini terdapat 2 kegiatan , yaitu : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu : 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu : Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan dengan target 100% dan realisasi 35% , realisasi masih rendah disebabkan karena pelaksanaan kegiatan kita berkaitan dengan instansi terkait dan Daerah Tetangga.
- Capaian realisasi rendah karena Fisik 58,17% dan pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut anggarannya belum terealisasi salah satunya disebabkan karena sebelumnya ada penyesuaian Jadwal Koordinasi terkait kegiatan ini bersama dengan Provinsi dan daerah Tetangga

g. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 51% realisasi 50%, sementara target keuangan sebesar Rp. 1.047.107.800,- (51,12%) dan realisasi Rp. 776.963.744,- (38,12%), pada program ini terdapat 1 kegiatan , yaitu : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Indikator sasaran Program untuk tahun 2023 ini hanya satu, yaitu Persentase Luas RTH Publik, target tahun 2024 adalah 4,23% untuk triwulan II realisasinya 4,23%. Indikator tercapai karena pelaksanaan kegiatannya selalu dilaksanakan setiap hari
- Capaian realisasi fisik dan keuangannya belum sesuai dengan target, disebabkan karena pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pelaksanaan kegiatannya sebagian bersifat rutin (sesuai dengan kebutuhan)

h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik kegiatan 68,50% realisasi 69%, sementara target keuangan sebesar Rp. 12.442.300,- (59,35%) dan realisasi Rp. 1.470.800,- (7,02%), pada program ini terdapat 2 kegiatan , yaitu : 1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam

Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. 2. Pengumpulan sementara Limbah B3 dengan Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase pembinaan / verifikasi lapangan terhadap komidmen persetujuan / izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dengan target tahun 2024 adalah 32% untuk triwulan II realisasinya 0% karena untuk kegiatan ini realisasinya belum bisa dihitung saat ini, hanya bisa hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024 atau tahun 2025.
- Capaian realisasi keuangannya belum sesuai dengan target, disebabkan karena pada Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 belum sesuai dengan rencana dan keuangannya masih rendah karena tertundanya pelaksanaan kegiatan (penyesuaian jadwal terkait Koordinasi dengan Pimpinan dan lainnya) sehingga kita tidak bisa mencairkan biaya makan dan Minum dan biaya yang lainnya.

i. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 48% realisasi sesuai dengan rencana yaitu 48%, sementara target keuangan sebesar Rp. 11.517.500,- (48%) dan realisasi Rp. 2.497.950,- (10,598%), pada program ini terdapat 1 kegiatan , yaitu : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan Lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan dengan target tahun 2024 adalah 55% realisasi triwulan II 0% , karena untuk kegiatan ini realisasinya belum bisa dihitung saat ini, hanya bisa hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024.
- Capaian realisasi Fisk sesuai dengan target yaitu 48% dan realisasi keuangan belum sesuai dengan target karena pada kegiatan dana yang dianggarkan adalah diantaranya adalah biaya makan minum kelapangan (sifatnya sesuai kebutuhan) seandainya ada masalah dilapangan (pengaduan masyarakat terkait pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturannya maka tim akan turun kelapangan untuk mamantaunya)

j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 15% realisasi sesuai dengan rencana 15%, sementara target keuangan sebesar Rp. 9.598.250,- (10,27%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), pada program ini terdapat 1 kegiatan , yaitu : Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu : Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Program ini adalah Jumlah Jenis Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup dengan target tahun 2024 adalah 2 jenis yaitu Penghargaan Adiwiyata dan Adipura untuk triwulan I realisasinya belum ada (0 Jenis), karena untuk triwulan I,II,III dan IV kita hanya melaksanakan pembinaan kesekolah sekolah, pembinaan ke kader lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan mengoperasikan petugas kebersihan dilapangan serta memberikan informasi lewat brosur, Liflet dan media elektronik , untuk penilaiannya bisanya dilakukan menjelang akhir tahun oleh Tim yang diturunkan dari Kementrian LHK RI dan hasilnya bisa di umumkan di akhir tahun atau diawal tahun berikutnya

k. Program Pengelolaan Persampahan

- Rencana capaian kinerja triwulan II pada program ini adalah rencana fisik 46,50% realisasi 33,50%, sementara target keuangan sebesar Rp. 4.562.834.490,- (36,90%) dan realisasi Rp. 3.582.365.588,- (29,00%), pada program ini terdapat 1 kegiatan , yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sampah. Pada Kegiatan ini terdapat 4 Sub Kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2)

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4) Kegiatan Penyediaan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan target tahun 2024 adalah 98% realisasi triwulan II adalah 99,3%, Target Indikator meningkat karena salah satunya adalah dengan adanya pemilahan sampah di TPA serta Pelayanan pengelolaan sampah dilapangan dan Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga dengan target tahun 2024 adalah 79% , untuk triwulan II realisasinya triwulan II 0%, karena untuk kegiatan ini realisasinya belum bisa dihitung saat ini, hanya bisa hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024.
- Capaian realisasi Fiskal 46,50% dan keuangan dan Fisik belum sesuai dengan target, karena pelaksanaan kegiatan ini adalah bersifat rutin (sesuai kebutuhan) diantaranya adanya biaya pembelian BBM, Pemeliharaan Mesin Potong Rumput, Jasa Petugas Kebersihan dan lainnya

II. Rekomendasi Program

1. Pada prinsipnya sebagai program sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan pada Tahun 2024 ini. Diharapkan hasil yang dicapai untuk triwulan III Tahun 2024 nantinya akan lebih baik dan meningkat lagi.

III. Evaluasi Rencana Aksi

1. Pada **Program Pengembangan Perumahan** telah dilaksanakan pelayanan dan kenyamanan bagi penghuni rumah susun
2. Pada **Program Kawasan Permukiman** telah dilaksanakan Koordinasi ke Balai Perumahan Permukiman terkait permohonan pendampingan pelaksanaan kegiatan Penyusunan /Reviu/Legasilisasi Kebijakan Bidang PKP
3. Pada **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**, telah dilaksanakan percepatan proses pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan rumah Layak Huni
4. Pada **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** , 1. Telah dilaksanakan pemeliharaan rutin terhadap Jalan, DAM dan Drainase yang rusak 2. Dan percepatan proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jalan, DAM dan Drainase
5. Pada **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, 1. Telah dilaksanakan rapat beberapa kali terkait Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kota
6. Pada **Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, 1. Telah dilaksanakan rapat beberapa kali terkait pembinaan terhadap masyarakat kampung Iklim 2. Telah dilaksanakan setiap bulannya pengambilan sampel Air Limbah, Air Sungai di lingkungan Kota Padang Panjang.
7. Pada **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**, Telah dilaksanakan Pembersihan Taman di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
8. Pada **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)**, Telah dilaksanakan pemantauan kelapangan setiap saat
9. Pada **Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**. Telah dilaksanakan pemantauan dan selalu melaksanakan pengawasan setiap bulannya terhadap pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun di Lingkungan Kota Padang Panjang, realisasi fisik kegiatan sesuai dengan target
10. Pada **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**. Selalu dilaksanakan Pembinaan terhadap lingkungan yang nyaman ke sekolah- sekolah tingkat SD, SMP dan SMA 2. Telah dilaksanakan Pembinaan terhadap kader lingkungan, realisasi fisik kegiatan mencapai sesuai dengan target
11. Pada **Program Pengelolaan Persampahan**, Telah dilaksanakan kegiatan pelaksanaan operasional terkait penyelesaian Persampahan dilapangan untuk menjaga lingkungan yang bersih

IV. EVALUASI IKU

Dari evaluasi IKU yang dilaksanakan maka diperoleh capaian sebagai berikut :

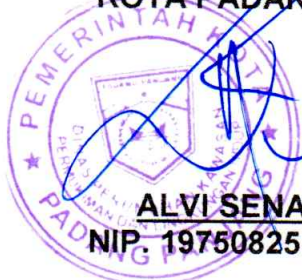
1. Capaian kinerja yang dilaporkan disesuaikan diantaranya sudah sesuai dengan target yang telah disusun Tahun 2024 ini berdasarkan indikator masing-masing tujuan dan sasaran pada Rencana PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
2. Adapun Indikator Kinerja yang diukur sebagai berikut :
 - a. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) **Presentase Permukiman Layak Huni**, **target sampai akhir Tahun 2024 adalah 98,80%**, untuk Triwulan II tahun ini realisasinya adalah 15%, Realisasi belum tercapai karena Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena ada Perubahan Pola anggaran yang awalnya bantuan diubah sekarang menjadi bantuan Sosial sehingga perlu disusun kembali aturan hukumnya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaannya belum bisa menghitung dari triwulan I, II dan III karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut kita selalu membenahi lingkungan permukiman, baik dari segi pemeliharannya maupun pembuatan sarana (Jalan, DAM dan Drainase)
 - b. Begitu juga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Indeks Kualitas Air (IKA)**, **target sampai akhir Tahun 2024 adalah 46,07**, untuk tahun ini realisasinya hanya bisa didapatkan di Akhir tahun 2024 dari 5 sungai. Hal ini dikarenakan pengujian sebelumnya dilakukan terhadap tujuh sungai dikurangi menjadi lima sungai di Kota Padang Panjang. Pengurangan ini merupakan penyesuaian yang diakomodir oleh PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang menyatakan bahwa sungai yang dipantau mewakili 50% dari sungai yang ada di wilayah administrasi, yang diusulkan melalui Surat Klarifikasi Target IKLH oleh Walikota Padang Panjang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta disetujui oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI. Sekaligus dilakukan penyesuaian titik pantau untuk menentukan lokasi pengambilan sampel pada sungai di Kota Padang Panjang. Sehingga didapati Cemar Sedang menjadi 20% atau 1/5 dengan uraian Cemar Ringan untuk empat sungai, yakni Batang Sibunian, Batang Sikakeh, Sungai Talang, dan Sungai Andok serta Cemar Sedang untuk satu sungai Batang Bakarek-Karek.
 - c. Pada Indikator Kinerja **Indeks Kualitas Udara (IKU)**, **targetnya sampai akhir Tahun 91,29**, Realisasinya hanya bisa didapatkan di Akhir tahun 2024 dan belum bisa didapatkan sekarang karena adanya kajian serta laporan nantinya dari Kemen LHK Pusat
 - d. Pada Indikator Kinerja **Indeks Kualitas Lahan (IKL)**, **targetnya sampai akhir Tahun 56,18**, Realisasinya hanya bisa didapatkan di Akhir tahun 2024 dan belum bisa didapatkan sekarang karena adanya kajian serta laporan nantinya dari Kemen LHK Pusat
 - e. Pada Indikator Kinerja **Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup targetnya sampai akhir Tahun 85,00**, Realisasinya hanya bisa didapatkan di Akhir tahun 2024 dan belum bisa didapatkan sekarang karena adanya kajian serta laporan nantinya dari Kemen LHK Pusat
 - f. Pada Indikator Kinerja **Angka Kemiskinan**, **targetnya sampai Akhir Tahun 5,14%**, Realisasinya hanya bisa didapatkan di Akhir tahun 2024 dan belum bisa didapatkan sekarang karena perhitungannya hanya bisa didapatkan pada Akhir Tahun.

V. Rekomendasi IKU

- a. Faktor – faktor yang akan memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Presentase Permukiman Layak Huni** adalah Berkurangnya kawasan Kumuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Lingkungan Kota Padang Panjang.

- b. Faktor – faktor yang akan memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Indeks Kualitas Air (IKA)** adalah bersihnya air sungai dari limbah LB3 sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan di Kota Padang Panjang
- c. Faktor – faktor yang akan memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Indeks Kualitas Udara (IKU)** adalah bersihnya Udara sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan di Kota Padang Panjang
- d. Faktor – faktor yang akan memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** adalah tercapainya IKL sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan di libgkungan Kota Padang Panjang
- e. Faktor – faktor yang akan memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Presentase Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah terpenuhinya indikator target sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Lingkungan Kota Padang Panjang.
- f. Faktor – faktor yang akan memenuhi keberhasilan pencapaian sasaran : **Angka Kemiskinan** adalah terpenuhinya indikator target sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DINAS PERKIM LH
KOTA PADANG PANJANG



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

Padang Panjang, 01 Juli 2024

NOTULIS
SEKRETARIS DINAS PERKIM LH
KOTA PADANG PANJANG

WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 19903 2 008

DOKUMENSI MONEV TRIWULAN II TANGGAL 28 JUNI 2024





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

Hari/Tgl : Jumat/ 28 Juni 2024
Waktu : 10.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas PerkimLH
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II

No.	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Tanda Tangan
		L	P		
1	Arwanto	✓		Kasub	
2	Yuningsih		✓	Kasub PLH	
3	Anno Suhar		✓	Subag Umper	
4	Ratih Maretha sy.		✓	PLH	
5	Nozi Meilani		✓	Pedal	
6	Wendy Gusar		✓	sekretaris	
7	Riki Rosdian	✓		Bid. Perkim	
8	Andi C.	✓		Bid. PA	
9	Indra S.		✓	Staf	
10	Mutia Wijaya		✓	staf uprel	
11	Hanpendrita		✓	Penguluh LH	
12					
13					
14					
15					

Padang Panjang, Juni 2024

Diketahui:

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004